



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, ada beberapa urusan yang perlu didukung dengan jabatan – jabatan tertentu dalam rangka untuk mendukung visi, misi Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Analisis Kebutuhan Jabatan dengan memperhitungkan rasio keseimbangan antara Beban Kerja dan jumlah Jabatan Fungsional pada setiap Perangkat Daerah dihapus satu jabatan fungsional yaitu : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, karena terdapat dua nomenklatur jabatan yang sama dan diperlukan penambahan 4 (empat) jabatan Fungsional yakni : Operator Transmisi Sandi, Pelatih Olahraga, Asisten Pelatih Olahraga dan Penguji Keselamatan kesehatan kerja sehingga perlu dilakukan Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 8 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 8);
- b. Nomor 9 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 9); dan
- c. Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 5),

diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 Februari 2018

Pjs. BUPATI SANGGAU,
ttd
MOSES TABAH

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ttd
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN (PERMENPAN DAN RB)	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	INSTANSI PEMBINA
1.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Nomor 15 Tahun 2009	Inspektorat Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri
2.	1) Pemeriksa Merek 2) Pemeriksa Paten 3) Perancang Peraturan Perundang-undangan	Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 47/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 1) Sekretariat Daerah 2) Sekretariat DPRD	Kementerian Hukum dan HAM
3.	1) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 2) Pemeriksa Pajak 3) Penyuluh Pajak	Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor PER 04/KEP/2/2006	Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah	Kementerian Keuangan
4.	1) Inspektur Ketenagalistrikan	Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/04/M.PAN/12/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Kementerian Perindustrian
6.	1) Penguji Mutu Barang 2) Penera	Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/05/M.PAN/1/2005 Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/03/M.PAN/1/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	PERATURAN YANG MENETAPKAN (PERMENPAN DAN RB)	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	INSTANSI PEMBINA
1.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Nomor 15 Tahun 2009	Inspektorat Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri
2.	1) Pemeriksa Merek 2) Pemeriksa Paten 3) Perancang Peraturan Perundang-undangan	Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 47/KEP/M.PAN/6/2003 Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 1) Sekretariat Daerah 2) Sekretariat DPRD	Kementerian Hukum dan HAM
3.	1) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 2) Pemeriksa Pajak 3) Penyuluh Pajak	Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 Nomor PER 04/KEP/2/2006	Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah	Kementerian Keuangan
4.	1) Inspektur Ketenagalistrikan	Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/04/M.PAN/12/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Kementerian Perindustrian
6.	1) Penguji Mutu Barang 2) Penera	Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/05/M.PAN/1/2005 Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 Jo. KEP/03/M.PAN/1/2005	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Kementerian Perdagangan

11.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawas Ketenagakerjaan 2) Instruktur 3) Mediator Hubungan Industrial 4) Pengantar Kerja 5) Penggerak Swadaya Masyarakat 	<p>Nomor 19 Tahun 2010</p> <p>Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003</p> <p>Nomor PER /06/M.PAN/4/2009</p> <p>Nomor 06/KEP/MK.WASPAN/2/2000</p> <p>Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</p>	Kementerian Tenaga Kerja
12.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Teknik Pengairan 2) Teknik Penyehatan Lingkungan 3) Teknik Jalan dan Jembatan 4) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 5) Penata Ruang 	<p>Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999</p> <p>Nomor PER/10/M.PAN/6/2007</p>	<p>Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air</p> <p>Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan</p> <p>Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air</p> <p>Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan</p> <p>Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tata Ruang dan Pertanahan</p>	Kementerian Pekerjaan Umum
13.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Administrator Kesehatan 2) Apoteker 3) Asisten Apoteker 4) Bidan 5) Dokter 6) Dokter Gigi 7) Epidemiologi Kesehatan 	<p>Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000</p> <p>Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 07/KEP/MK.WASPAN/12/1999</p> <p>Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008</p> <p>Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003</p> <p>Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 	Kementerian Kesehatan

8) Entomolog Kesehatan	Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
9) Fisioterapis	Nomor KEP/04/M.PAN/11/2004	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
10) Fisikawan Medis	Nomor PER/12/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
11) Nutrisionis	Nomor 23/KEP/12/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
12) Okupasi Terapis	Nomor PER/123/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
13) Ortosis Prostesis	Nomor PER/122/M.PAN/12/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
14) Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
15) Perawat	Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
16) Perawat Gigi	Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
17) Perckam Medis	Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
18) Pranata Laboratorium Kesehatan	Nomor PER/08/M.PAN/3/2006	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
19) Psikolog Klinis	Nomor PER/11/M.PAN/5/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
20) Radiografer	Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
21) Refraksionis Optisien	Nomor PER/47/M.PAN/4/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
22) Sanitarian	Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
23) Teknik Elektromedis	Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman

	24) Teknisi Gigi	Nomor PER/05/M.PAN/4/2007	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman	
	25) Terapis Transfusi Darah	Nomor PER/06/M.PAN/4/2007	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman	
	26) Terapis Wicara	Nomor PER/48/M.PAN/4/2005	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman	
	27) Dokter Pendidik Klinis	Nomor PER/17/M.PAN/9/2008	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman	
	28) Pembimbing Kesehatan Kerja	Nomor 13 Tahun 2013	1) Dinas Kesehatan 2) Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman	
14.	1) Guru 2) Penilik 3) Pamong Belajar 4) Pengawas Sekolah 5) Pengembang Teknologi Pembelajaran 6) Pranata Laboratorium Pendidikan	Nomor 16 Tahun 2009 Nomor 14 Tahun 2010 Nomor 15 Tahun 2010 Nomor 21 Tahun 2010 Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 Nomor 3 Tahun 2010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15.	1) Pekerja Sosial 2) Penyuluh Sosial	Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 Nomor PER/06/M.PAN/5/2008	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Kementerian Sosial
16.	Pamong Budaya	Nomor PER/09/M.PAN/5/2008	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17.	1) Adikara Siaran 2) Teknisi Siaran 3) Andalan Siaran 4) Pranata Humas	Nomor 130/M.PAN/1989 Nomor 128/M.PAN/1989 Nomor 129/M.PAN/1989 Nomor PER/109/M.PAN/11/2005	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika

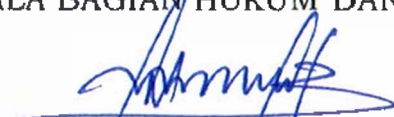
18.	1) Pengendali Dampak Lingkungan 2) Pengawas Lingkungan Hidup	Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Nomor 39 Tahun 2011	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup
19.	Perencana	Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
20.	Analisis Kebijakan	Nomor 5 Tahun 2012	Sekretariat Daerah	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
21.	Arsiparis	Nomor PER/3/M.PAN/3/2009	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Arsip Nasional (ANRI)
22.	1) Analisis Kepegawaian 2) Auditor Kepegawaian 3) Assessor SDM Aparatur	Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 Nomor 40 Tahun 2012 Nomor 41 Tahun 2012	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
23.	Pustakawan	Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
24.	Pranata Komputer	Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003	Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah	Badan Pusat Statistik
25.	Penyuluh Keluarga Berencana	Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
26.	Surveyor Pemetaan	Nomor 134/ KEP/ M.PAN/ 12/ 2002	1) Dinas Perumahan, Ciptakarya, Tataruang dan Pertanahan 2) Dinas Perkebunan dan Peternakan	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)
27.	Auditor	Nomor PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 Jo. Nomor 51 Tahun 2012	Inspektorat	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

28.	Pengawas Farmasi dan Makanan	Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002	Dinas Kesehatan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
29.	Penerjemah	Nomor PER/124/M.PAN/5/2006	Sekretariat Daerah	Sekretariat Negara
30.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Nomor 77 Tahun 2012	Sekretariat Daerah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
31.	Peneliti	Nomor KEP /128/M.PAN/9/2004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
32.	Perekayasa	Nomor PER/219/M.PAN/6/2008	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
33.	Penyuluh Hukum	Nomor 3 Tahun 2014	Sekretariat Daerah	Kementerian Hukum dan HAM
34.	Polisi Pamong Praja (Pol PP)	Nomor 4 Tahun 2014	Satuan Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri
35.	Widyaiswara	Nomor 14 Tahun 2009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
36.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Nomor 42 Tahun 2014	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kementerian Keuangan Republik Indonesia

37.	Operator Transmisi Sandi	Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003	Dinas Komunikasi dan Informatika	Lembaga Sandi Negara
38.	Pelatih Olahraga	Nomor 40 Tahun 2014	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Kementerian Pemuda dan Olahraga
39.	Asisten Pelatih Olahraga	Nomor 41 Tahun 2014	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Kementerian Pemuda dan Olahraga
40.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Nomor 36 Tahun 2014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Ketenagakerjaan

Pjs. BUPATI SANGGAU,
ttd
MOSES TABAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002